



PENDAMPINGAN VALIDASI DATA SOSIAL EKONOMI UNTUK KETEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DI GAMPONG TUNGKOP, ACEH BESAR

SOCIOECONOMIC DATA VALIDATION ASSISTANCE FOR ACCURATE SOCIAL ASSISTANCE TARGETING IN GAMPONG TUNGKOP, ACEH BESAR

Lidyana Dinda^{1*}, Aulia Khairullah², Indra Akbar³, Natasya Amelia Yosa³

¹Program Studi Analis Keuangan, Politeknik Kutaraja, Aceh, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

³Program Studi Administrasi Perkantoran, Politeknik Kutaraja, Aceh, Indonesia

*Email Koresponden: lidyana.dinda@poltekkutaraja.ac.id

Abstract

The effectiveness of social assistance targeting is strongly influenced by the quality and timeliness of community socioeconomic data. Changes in employment, income, domicile, family composition, and asset ownership may cause recorded information to no longer reflect actual conditions. This community engagement program aimed to assist the verification and validation of the National Unified Socioeconomic Data (*Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional-DTSEN*) to improve the accuracy of social assistance beneficiary proposals in Gampong Tungkop, Darussalam District, Aceh Besar Regency. The program employed a descriptive-participatory approach using the *Participatory Rural Appraisal* method and involved 23 participants, including village officials, social data administrators, members of the *tuha peut*, community leaders, residents' representatives, and the implementation team. Data were collected through participatory observation, document review, group discussions, village deliberations, and documentation and were subsequently analysed using descriptive and thematic approaches. The results showed that the assistance program improved participants' shared understanding of the functions of DTSEN, welfare decile classifications, and procedures for proposing and updating data. The village deliberation also facilitated clarification of residents' socioeconomic conditions, identification of data requiring administrative correction or field verification, and formulation of follow-up recommendations for the village government. These findings indicate that participatory data verification can strengthen data transparency, accuracy, and timeliness. However, the results of this program do not constitute the final determination of social assistance beneficiaries, as such decisions remain subject to applicable regulations and the authority of the relevant government institutions.

Keywords: *Data Verification, DTSEN, Social Assistance, Socioeconomic Data, Village Deliberation.*

Abstrak

Ketepatan sasaran bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Perubahan pekerjaan, pendapatan, domisili, komposisi keluarga, dan kepemilikan aset dapat menyebabkan data yang tercatat tidak lagi sesuai dengan kondisi faktual. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk mendukung ketepatan pengusulan penerima bantuan sosial di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif dengan metode *Participatory Rural Appraisal* yang melibatkan 23 peserta, terdiri atas aparatur gampong, petugas pengelola data sosial, Tuha Peut, tokoh masyarakat, perwakilan warga, dan tim pelaksana. Data



dikumpulkan melalui observasi partisipatif, telaah dokumen, diskusi kelompok, musyawarah gampong, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan mampu menyamakan pemahaman peserta mengenai fungsi DTSEN, pengelompokan desil kesejahteraan, serta mekanisme pengusulan dan pembaruan data. Musyawarah gampong juga menghasilkan klarifikasi terhadap kondisi sosial ekonomi warga, identifikasi data yang memerlukan perbaikan administratif atau pemeriksaan lapangan, serta rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah gampong. Kegiatan ini menegaskan bahwa verifikasi data secara partisipatif dapat memperkuat transparansi, akurasi, dan kemutakhiran data. Namun, hasil pendampingan bukan merupakan penetapan langsung penerima bantuan karena keputusan akhir tetap mengikuti ketentuan dan kewenangan instansi terkait.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Data Sosial Ekonomi, DTSEN, Musyawarah Gampong, Verifikasi Data.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan instrumen perlindungan sosial yang digunakan pemerintah untuk menjaga daya beli, mengurangi beban pengeluaran, dan melindungi rumah tangga miskin serta rentan dari tekanan ekonomi. Keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan, tetapi juga oleh ketepatan penerima dan kesesuaian program dengan kebutuhan rumah tangga. Bantuan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman agar keluarga miskin tidak mengalami penurunan kesejahteraan yang lebih dalam. Namun, bantuan sosial tunai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan rumah tangga penerima, sehingga ketepatan sasaran dan efektivitas program tetap perlu dievaluasi (Nurhasanah *et al.*, 2024). Ketepatan sasaran bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data sosial ekonomi yang digunakan.

Data yang tidak akurat dapat menimbulkan *inclusion error*, yaitu rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh bantuan, dan *exclusion error*, yaitu rumah tangga yang layak justru tidak menerima bantuan. Penerima Program Keluarga Harapan 21,54 persen dalam penelitiannya bukan berasal dari kelompok miskin. Pada saat yang sama, masih terdapat keluarga miskin yang belum menerima bantuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan data dapat mengurangi efisiensi penggunaan anggaran, memunculkan kecemburuan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah (Sofianto, 2020).

Upaya memperbaiki kualitas data dilakukan melalui pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, penetapan sasaran, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan serta perlindungan sosial. Meskipun demikian, akurasi data masih menjadi tantangan (SKALA, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hanya 32 persen rumah tangga yang dinilai layak tercatat menerima Program Sembako berdasarkan analisis data Susenas 2023. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh sistem pemutakhiran data yang belum optimal dan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengakses serta memanfaatkan data sosial ekonomi. Oleh sebab itu, pemutakhiran data hingga tingkat desa atau gampong diperlukan karena pekerjaan, pendapatan, komposisi keluarga, domisili, dan kepemilikan aset masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.



DTSEN mengelompokkan keluarga ke dalam sepuluh desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Setiap desil menggambarkan sekitar 10 persen kelompok keluarga yang telah diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Pengelompokan desil membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan dalam program perlindungan sosial. Penggunaan kelompok desil diperlukan untuk menentukan segmen masyarakat terbawah yang layak menjadi sasaran bantuan (Santoso *et al.*, 2023). Dalam ketentuan operasional Kementerian Sosial, keluarga pada Desil 1-4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Program Sembako, sedangkan keluarga pada Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Posisi desil tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima karena penetapan akhir tetap bergantung pada persyaratan program, hasil verifikasi, komponen keluarga, dan ketersediaan kuota (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2026).

Verifikasi dan validasi pada tingkat gampong menjadi penting karena aparaturnya dan masyarakat setempat memiliki pengetahuan langsung mengenai perubahan kondisi warga. Proses pemutakhiran data masih menghadapi kendala berupa ketidaktertiban administrasi kependudukan, perpindahan penduduk, kematian, pergantian petugas, keterbatasan koordinasi, dan pelaksanaan verifikasi yang belum optimal (Santoso *et al.*, 2023). Selain pemeriksaan lapangan, keterbukaan informasi juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengoreksi status datanya. Sistem informasi yang menyediakan pemetaan data dan pencarian berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dapat meningkatkan transparansi serta memudahkan masyarakat memeriksa keterdaftaran mereka dalam basis data kesejahteraan sosial (Kurniadi *et al.*, 2022).

Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, merupakan wilayah yang berkembang dan berdekatan dengan kawasan pendidikan Universitas Syiah Kuala serta UIN Ar-Raniry. Perubahan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk di wilayah tersebut dapat diikuti oleh perubahan kondisi pekerjaan, pendapatan, domisili, maupun struktur rumah tangga. Keadaan tersebut menuntut tersedianya data sosial ekonomi yang selalu diperbarui. Pendampingan diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada aparaturnya dan masyarakat mengenai fungsi DTSEN, pengelompokan desil, persyaratan program bantuan sosial, dan prosedur pengusulan dan perbaikan data. Musyawarah gampong dapat dimanfaatkan sebagai ruang klarifikasi agar informasi dalam sistem dapat dibandingkan dengan kondisi faktual tanpa mengabaikan bukti administratif dan prinsip objektivitas.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak mengevaluasi dampak bantuan sosial, mengkaji pelaksanaan verifikasi data, atau mengembangkan sistem informasi, kegiatan ini menekankan pendampingan langsung dalam proses validasi data sosial ekonomi di tingkat gampong. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta, mengidentifikasi data yang perlu diperbaiki, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membantu pemerintah gampong menyusun usulan penerima bantuan secara lebih transparan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi verifikasi dan validasi data sosial ekonomi untuk mendukung efektivitas serta ketepatan sasaran bantuan sosial di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.



METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan tersebut dipilih karena menempatkan aparat gampong dan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam mengidentifikasi masalah, memeriksa kesesuaian data, menyampaikan informasi faktual, serta merumuskan tindak lanjut. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses diskusi dan membantu peserta menyusun hasil kegiatan. Hidayana *et al.* (2019), menjelaskan bahwa metode PRA memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam mengenali permasalahan, menganalisis kondisi wilayah, dan menyusun rencana tindakan berdasarkan pengetahuan lokal.

Kegiatan dilaksanakan di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada 07 April 2026. Peserta kegiatan berjumlah 23 orang, yang terdiri atas aparat gampong, operator atau petugas pengelola data sosial, Tuha Peut, tokoh masyarakat, perwakilan warga, dan tim pelaksana pengabdian. Penentuan peserta dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan, tanggung jawab, dan pengetahuan peserta terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pelaksanaan pendataan bantuan sosial di Gampong Tungkop. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kemungkinan adanya perbedaan antara data sosial ekonomi yang tercatat dan keadaan aktual masyarakat. Perubahan pekerjaan, sumber pendapatan, komposisi keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, perpindahan domisili, kelahiran, dan kematian dapat menyebabkan data yang sebelumnya sesuai menjadi tidak lagi mutakhir. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional merupakan basis data individu dan keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi serta telah dipadankan dengan data kependudukan. Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui proses verifikasi dan pengecekan lapangan agar data dapat digunakan untuk mendukung penyaluran program sosial yang lebih tepat sasaran.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi daftar atau rekapitulasi data sosial ekonomi masyarakat, daftar usulan penerima bantuan sosial, formulir pemeriksaan data, lembar pencatatan hasil musyawarah, daftar hadir, materi mengenai DTSEN dan pengelompokan desil kesejahteraan, serta dokumen administratif pendukung. Peralatan yang digunakan terdiri atas laptop, proyektor, layar presentasi, alat tulis, pengeras suara, telepon seluler atau kamera untuk dokumentasi, serta perangkat penyimpanan data. Identitas pribadi masyarakat tidak disajikan dalam artikel dan hasil pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi untuk menjaga kerahasiaan data. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Gampong Tungkop untuk mengidentifikasi permasalahan pendataan, menentukan peserta, menetapkan waktu kegiatan, dan menyiapkan dokumen yang akan dibahas. Tim pelaksana kemudian menyusun materi pendampingan, instrumen observasi, dan lembar pemeriksaan data. Aspek yang disiapkan untuk diverifikasi meliputi identitas kependudukan, susunan anggota keluarga, pekerjaan, sumber pendapatan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, status penerimaan bantuan, dan perubahan keadaan sosial ekonomi rumah tangga.



Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan musyawarah gampong. Materi yang diberikan mencakup fungsi DTSEN, pengelompokan tingkat kesejahteraan berdasarkan desil, pentingnya pemutakhiran data, risiko ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, dan prosedur pengusulan dan perbaikan data. Setelah pemaparan materi, peserta membahas data sosial ekonomi yang tersedia dengan membandingkan informasi administratif dan kondisi aktual masyarakat. Setiap data yang belum sesuai dicatat sebagai bahan koreksi, konfirmasi lanjutan, usulan baru, atau peninjauan kembali. Penerapan PRA dalam musyawarah desa relevan karena dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan pengambilan keputusan lokal.

Tahap evaluasi dilakukan dengan merangkum hasil musyawarah dan mengelompokkan data berdasarkan status pemeriksaannya. Pengelompokan tersebut terdiri atas data yang telah sesuai, data yang membutuhkan perbaikan administratif, data yang memerlukan konfirmasi lapangan, usulan calon penerima baru, dan data penerima yang perlu ditinjau kembali. Hasil kegiatan kemudian disusun menjadi rekapitulasi dan rekomendasi tindak lanjut untuk disampaikan kepada Pemerintah Gampong Tungkop. Hasil pendampingan tidak digunakan untuk menetapkan penerima bantuan secara langsung karena keputusan akhir tetap mengikuti kewenangan, prosedur, dan ketentuan program pemerintah yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, telaah dokumen, diskusi kelompok, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencatat jalannya kegiatan, keterlibatan peserta, penyampaian pendapat, dan proses pengambilan keputusan. Telaah dokumen dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan dokumen pendukung dan informasi yang disampaikan dalam musyawarah. Diskusi kelompok digunakan untuk memperoleh klarifikasi mengenai kondisi faktual masyarakat, sedangkan dokumentasi berupa daftar hadir, foto kegiatan, materi, notulensi, dan rekapitulasi hasil digunakan sebagai bukti serta data pendukung kegiatan.

Tabel 1. Parameter Pemeriksaan Kualitas Data Sosial Ekonomi

Parameter	Definisi Operasional	Indikator Pemeriksaan
Akurasi	Kesesuaian data dengan keadaan faktual masyarakat	Identitas, pekerjaan, kondisi keluarga, tempat tinggal, dan kepemilikan aset sesuai dengan dokumen atau hasil konfirmasi
Kelengkapan	Ketersediaan seluruh unsur data yang dibutuhkan	Tidak terdapat kolom penting yang kosong dan dokumen pendukung tersedia
Konsistensi	Keselarasan informasi antardokumen dan sumber informasi	Tidak terdapat perbedaan antara data kependudukan, data keluarga, dan keterangan masyarakat
Kemutakhiran	Kesesuaian data dengan kondisi terbaru	Perubahan pekerjaan, domisili, anggota keluarga, pendapatan, atau aset telah dicatat
Validitas	Kesesuaian data dengan ketentuan dan format yang berlaku	NIK, nomor KK, alamat, dan informasi administratif dapat diverifikasi
Keunikan	Tidak terdapat pencatatan lebih dari satu kali	Tidak ditemukan duplikasi NIK, nomor KK, atau rumah tangga

Parameter pemeriksaan didasarkan pada dimensi kualitas data, yaitu akurasi, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, validitas, dan keunikan. Dimensi kualitas data



digunakan untuk menilai sejauh mana karakteristik data memenuhi kebutuhan serta layak digunakan dalam pengambilan keputusan. Papastergios & Gounaris (2024), menjelaskan bahwa kualitas data dapat dinilai melalui sejumlah dimensi, antara lain akurasi, kelengkapan, dan konsistensi, yang juga menjadi bagian dari model kualitas data ISO/IEC 25012.

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan menghitung jumlah dan persentase data pada setiap kategori hasil verifikasi. Analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan proporsi data yang telah sesuai, memerlukan perbaikan, membutuhkan pemeriksaan lapangan, diusulkan sebagai data baru, atau perlu ditinjau kembali. Persentase dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase kategori hasil verifikasi

f = jumlah data pada kategori tertentu dan

N = jumlah keseluruhan data yang diperiksa.

Data kualitatif yang berasal dari hasil observasi, catatan diskusi, dan musyawarah dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis dilakukan dengan membaca dan memahami seluruh catatan kegiatan, memberikan kode pada informasi penting, mengelompokkan kode ke dalam tema, meninjau kesesuaian tema, memberikan nama pada tema, serta menyusun interpretasi hasil. Analisis tematik dipilih karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola permasalahan dalam data kualitatif secara sistematis (Braun & Clarke, 2021). Keberhasilan kegiatan dinilai berdasarkan keterlaksanaan penyampaian materi, keterlibatan peserta dalam musyawarah, teridentifikasinya ketidaksesuaian data, tersusunnya rekapitulasi hasil pemeriksaan, dan tersedianya rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Gampong Tungkop. Pendekatan tersebut digunakan agar kegiatan tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman, tetapi juga menghasilkan dokumen administratif yang dapat mendukung pemutakhiran data dan ketepatan pengusulan penerima bantuan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan verifikasi dan validasi data sosial ekonomi dilaksanakan di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui pertemuan tatap muka yang melibatkan tim pelaksana, aparatur gampong, petugas pengelola data, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Kegiatan terdiri atas penyampaian materi, pembahasan data sosial ekonomi, diskusi mengenai pengelompokan desil kesejahteraan, serta penyusunan tindak lanjut terhadap data yang dinilai belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Forum tersebut memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan koreksi, usulan, dan informasi mengenai perubahan keadaan sosial ekonomi warga.

Materi yang disampaikan mencakup pengertian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), fungsi data dalam penetapan sasaran program sosial, pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil, serta mekanisme pengusulan dan pembaruan data. DTSEN merupakan basis data individu dan keluarga yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan keluarga. Data tersebut dibentuk melalui penggabungan berbagai sumber data resmi, dipadankan dengan data kependudukan, dan diperbarui secara berkala untuk mendukung perencanaan program dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai daftar penerima bantuan, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025).

Tabel 2. Hasil pelaksanaan pendampingan di Gampong Tungkop

Tahapan kegiatan	Hasil yang diperoleh	Kegunaan
Penyampaian materi	Peserta memperoleh informasi mengenai DTSEN, desil kesejahteraan, dan mekanisme pembaruan data	Menyamakan pemahaman peserta sebelum pembahasan data
Pembahasan data	Informasi dalam data dibandingkan dengan kondisi faktual masyarakat	Mengidentifikasi data yang belum akurat atau belum mutakhir
Musyawarah gampong	Peserta menyampaikan klarifikasi, koreksi, usulan, dan tanggapan	Memperkuat keterlibatan masyarakat dan transparansi
Pengelompokan hasil	Data dikelompokkan berdasarkan status kesesuaian dan kebutuhan tindak lanjut	Memudahkan penyusunan rekapitulasi hasil verifikasi
Penyusunan rekomendasi	Dihasilkan rekomendasi perbaikan dan pembaruan data	Menjadi bahan tindak lanjut Pemerintah Gampong Tungkop

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyampaian materi diperlukan karena masih terdapat kemungkinan perbedaan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara DTSEN, desil, dan penerimaan bantuan sosial. Keberadaan seseorang dalam DTSEN tidak secara otomatis menetakannya sebagai penerima seluruh jenis bantuan. Penetapan penerima tetap mempertimbangkan persyaratan setiap program, komponen keluarga, peringkat kesejahteraan, hasil verifikasi, ketersediaan kuota, dan keputusan instansi yang berwenang. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah anggapan bahwa setiap warga yang terdata harus memperoleh bantuan yang sama. Pengelompokan desil menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian dalam kegiatan pendampingan. Desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan penduduk yang dibagi ke dalam sepuluh kelompok dengan jumlah yang relatif sama. Desil 1 menunjukkan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Pemeringkatan tersebut didasarkan pada kondisi sosial ekonomi keluarga, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, sumber penghasilan, daya listrik, serta kepemilikan aset. Desil digunakan sebagai salah satu dasar penargetan program, tetapi bukan satu-satunya syarat penetapan penerima bantuan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2026).

**Tabel 3.** Pemaknaan kelompok desil dalam kegiatan pendampingan

Kelompok desil	Posisi tingkat kesejahteraan	Pemaknaan dalam pengusulan program
Desil 1	Kelompok 10% terbawah	Memerlukan perhatian dan prioritas paling tinggi sesuai persyaratan program
Desil 2	Kelompok 10–20% terbawah	Termasuk kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah
Desil 3	Kelompok 20–30% terbawah	Dapat dipertimbangkan dalam program perlindungan sosial sesuai kriteria
Desil 4	Kelompok 30–40% terbawah	Termasuk kelompok rentan yang dapat diusulkan sesuai persyaratan
Desil 5	Kelompok 40–50%	Berpotensi memperoleh program tertentu sesuai kriteria dan kebijakan
Desil 6–10	Kelompok 50% ke atas	Umumnya bukan sasaran utama bantuan sosial reguler, kecuali diatur berbeda dalam program tertentu

Sumber: diolah dari informasi DTSEN dan ketentuan program sosial.

Tabel 3 tidak dimaksudkan sebagai dasar penetapan penerima secara langsung, penggunaan istilah “dapat dipertimbangkan” atau “dapat diusulkan” lebih tepat daripada “pasti berhak menerima”, sebab setiap program memiliki sasaran dan persyaratan yang berbeda. Sebagai contoh, Program Sembako ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi ketentuan program serta memiliki NIK yang telah dipadankan dengan data kependudukan. Karena itu, posisi desil harus dibaca bersama dengan kondisi keluarga, kelengkapan administrasi, komponen penerima, dan kebijakan program yang berlaku (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2026). Musyawarah gampong memberikan manfaat penting dalam mempertemukan data administratif dengan pengetahuan lokal masyarakat. Aparatur gampong dan masyarakat lebih dekat dengan perubahan kondisi warga, seperti perpindahan domisili, kematian, perubahan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, perubahan susunan keluarga, dan peningkatan atau penurunan kepemilikan aset. Pemutakhiran data penerima perlindungan sosial diperlukan karena dapat terjadi perubahan eligibilitas, komponen keluarga, domisili, data kependudukan, serta kondisi sosial ekonomi penerima, penggunaan musyawarah sebagai sarana untuk memperoleh informasi terbaru sebelum hasilnya diteruskan melalui mekanisme resmi (Uswanas & Nuraida, 2023).

Keterlibatan masyarakat juga membantu mengurangi ketergantungan pada data lama yang tidak lagi menggambarkan keadaan sebenarnya. Pengelolaan data kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yang mencakup pengusulan, verifikasi dan validasi, penjaminan kualitas, penetapan, serta penggunaan data (Manoppo & Laoh, 2022). Artinya, pengusulan oleh pemerintah gampong bukanlah tahap akhir, melainkan bagian awal dari proses pemeriksaan yang lebih luas. Hasil musyawarah harus dicatat secara tertib dan disampaikan kepada petugas yang memiliki kewenangan untuk memperbarui data dalam sistem.

Hasil tersebut sejalan dengan kegiatan pengabdian Dewi *et al.* (2024), mengenai pendataan kemiskinan di Desa Garawastu. Dari 129 kepala keluarga yang sebelumnya tercatat, sebanyak 123 kepala keluarga dapat diverifikasi dan divalidasi, sedangkan enam lainnya tidak dapat dipertahankan dalam data karena telah meninggal dunia atau berpindah tempat tinggal.



Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan lapangan dan konfirmasi dengan pemerintah desa dapat menemukan perubahan faktual yang tidak langsung tercatat dalam basis data pusat. Dengan demikian, pendampingan di Gampong Tungkop memiliki dasar empiris karena perubahan kondisi penduduk dapat memengaruhi akurasi data penerima program sosial. Proses verifikasi tidak hanya diperlukan untuk menemukan warga yang perlu dikeluarkan dari data, tetapi juga untuk mengidentifikasi masyarakat miskin atau rentan yang belum tercatat. Dalam kegiatan pendampingan, peserta diarahkan untuk membedakan antara koreksi data administratif, usulan calon penerima baru, dan peninjauan kembali penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Pemisahan tersebut diperlukan agar setiap persoalan memperoleh tindak lanjut yang sesuai dan tidak seluruhnya diperlakukan sebagai kesalahan yang sama.

Pemeriksaan kondisi sosial ekonomi secara langsung tetap diperlukan meskipun proses pendataan telah memanfaatkan teknologi. Ballu & Fahlevvi (2025), menemukan adanya perbedaan antara basis data awal dan keadaan faktual setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.127 keluarga. Penelitian tersebut juga menemukan *inclusion error*, yaitu keluarga yang secara faktual tidak termasuk miskin tetapi masih berada dalam data penerima. Temuan itu menunjukkan bahwa sistem digital perlu didukung oleh observasi lapangan, bukti administratif, dan pengetahuan masyarakat lokal agar kualitas data tetap terjaga. Penggunaan teknologi tetap memberikan manfaat besar dalam penyimpanan, pencarian, dan transparansi data. Kurniadi *et al.* (2022), menemukan bahwa sistem informasi geografis yang memungkinkan masyarakat mengetahui persebaran DTKS dan memeriksa status keterdaftaran berdasarkan NIK. Sistem tersebut membantu pemerintah mengelola data secara lebih sistematis sekaligus meningkatkan akses informasi bagi masyarakat. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa catatan hasil musyawarah Gampong Tungkop perlu ditindaklanjuti ke dalam sistem resmi agar koreksi yang disepakati tidak berhenti sebagai dokumen manual.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, validasi data berkaitan langsung dengan efisiensi alokasi anggaran publik. Anggaran bantuan sosial memiliki keterbatasan sehingga harus didistribusikan kepada keluarga dengan kebutuhan paling tinggi. Kesalahan penetapan penerima dapat mengakibatkan kebocoran anggaran kepada kelompok yang kurang berhak, sedangkan masyarakat miskin yang seharusnya memperoleh perlindungan justru terlewat. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas pengeluaran pemerintah dan menimbulkan biaya sosial berupa kecemburuan, konflik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat. Nurhasanah (2024), menemukan bahwa Bantuan Sosial Tunai menurunkan ukuran kedalaman kemiskinan penerima sebesar 0,136 dibandingkan kelompok bukan penerima, tetapi dampak tersebut tidak signifikan secara statistik. Penelitian itu juga menemukan bahwa semakin miskin suatu keluarga, probabilitas menjadi penerima BST justru cenderung lebih kecil dalam sampel penelitian. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas bantuan tidak hanya bergantung pada penyaluran dana, tetapi juga pada ketepatan pemilihan keluarga penerima.

Ketepatan penerima juga harus disertai ketepatan jenis program, rumah tangga pada tingkat kesejahteraan yang sama belum tentu memiliki kebutuhan yang sama. Keluarga dengan anggota lanjut usia, penyandang disabilitas, anak sekolah, ibu hamil, atau anggota keluarga dengan penyakit tertentu memerlukan bentuk intervensi yang berbeda. Oleh karena itu, hasil

verifikasi di Gampong Tungkop sebaiknya tidak hanya menghasilkan daftar layak atau tidak layak, tetapi juga memberikan gambaran karakteristik kebutuhan keluarga agar program yang diusulkan lebih sesuai. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa peningkatan akses informasi mengenai DTSEN dan desil, forum klarifikasi kondisi masyarakat, catatan data yang memerlukan pemeriksaan, serta rekomendasi tindak lanjut untuk Pemerintah Gampong Tungkop. Namun, peningkatan pemahaman peserta belum dapat dinyatakan dalam bentuk persentase karena kegiatan belum menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Demikian pula, dampak kegiatan terhadap ketepatan penyaluran bantuan belum dapat dinilai sebelum hasil verifikasi diproses dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Oleh sebab itu, hasil kegiatan lebih tepat dimaknai sebagai penguatan proses pendataan dan partisipasi masyarakat, bukan sebagai penetapan langsung penerima bantuan sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan memperlihatkan bahwa akurasi DTSEN membutuhkan kerja sama antara sistem nasional dan pemerintahan lokal. Sistem nasional menyediakan basis data dan metode pemeringkatan yang seragam, sedangkan pemerintah gampong serta masyarakat memberikan informasi faktual mengenai perubahan keadaan penduduk. Kolaborasi tersebut dapat mengurangi kesalahan pencatatan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan efisiensi kebijakan perlindungan sosial. Pendampingan di Gampong Tungkop perlu dilanjutkan melalui pemutakhiran berkala, peningkatan kemampuan operator, pencatatan hasil musyawarah yang tertib, dan penyediaan mekanisme pengaduan agar masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data secara bertanggung jawab.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Data Usulan Bantuan Sosial Berbasis DTSEN di Gampong Tungkop



KESIMPULAN

Pendampingan verifikasi dan validasi data sosial ekonomi di Gampong Tungkop menunjukkan bahwa keterlibatan aparatur gampong, petugas pengelola data, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Musyawarah gampong mampu mempertemukan informasi administratif dengan kondisi faktual masyarakat sehingga perubahan pekerjaan, pendapatan, domisili, susunan keluarga, kepemilikan aset, serta status penerimaan bantuan dapat diidentifikasi secara lebih terbuka dan partisipatif. Proses tersebut juga membantu peserta memahami bahwa posisi keluarga dalam kelompok desil tidak secara otomatis menentukan penerimaan bantuan sosial karena keputusan akhir tetap mempertimbangkan persyaratan program, hasil verifikasi, kelengkapan administrasi, ketersediaan kuota, dan kewenangan instansi terkait. Kegiatan ini telah mencapai tujuannya dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai DTSEN dan pengelompokan desil, menyediakan forum klarifikasi data, mengidentifikasi data yang memerlukan perbaikan atau pemeriksaan lanjutan, serta menghasilkan rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Gampong Tungkop. Dengan demikian, makna utama kegiatan ini bukan terletak pada penetapan langsung penerima bantuan sosial, melainkan pada penguatan tata kelola pendataan yang lebih akurat, transparan, partisipatif, dan responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Hasil kegiatan juga menegaskan bahwa kualitas data sosial ekonomi membutuhkan kolaborasi antara sistem pendataan nasional dan pengetahuan faktual pemerintah serta masyarakat di tingkat gampong. Pemutakhiran DTSEN perlu dilaksanakan secara berkala melalui peningkatan kompetensi operator, pencatatan hasil musyawarah secara tertib, pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan atau sanggahan yang mudah diakses masyarakat. Kegiatan lanjutan juga perlu menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pemahaman peserta serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil verifikasi agar pengaruh pendampingan terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial dapat dinilai secara lebih objektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penghargaan juga disampaikan kepada aparatur gampong, petugas pengelola data sosial, Tuha Peut, tokoh masyarakat, serta seluruh perwakilan warga yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan, diskusi, verifikasi, dan validasi data sosial ekonomi. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemutakhiran data serta peningkatan ketepatan sasaran program bantuan sosial di Gampong Tungkop.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional: Solusi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran*. Dilihat 17 Juli 2026. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional-solusi-perencanaan-pembangunan-yang-lebih-tepat-sasaran-nje71>
- Ballu, D. Z. A. & Fahlevvi, M. R. (2025). Strategi Adaptif dalam Validasi Data Kemiskinan: Mengatasi Kendala Infrastruktur Digital melalui Pendekatan *Door-to-Door*. *Jurnal Registratie*, 7(2), 128–142. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5906>
- Braun, V. & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: SAGE Publications Ltd.
- Dewi, N. O. P., Arza, R. A., Setiawan, I. & Hutasuht, Z. F. (2024). Pengabdian Masyarakat Melalui Pendataan Kemiskinan dengan Aplikasi BANGKIT: Studi Praktik di Desa Garawastu Kecamatan Sindang, Majalengka. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 153–166. <https://doi.org/10.33701/cc.v4i2.4965>
- Hudayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W. & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 3–16. <https://doi.org/10.22146/bb.50890>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2026). *Cek Bansos Kementerian Sosial*. Dilihat 17 Juli 2026. <https://cekbansos.kemensos.go.id>
- Kurniadi, D., Mulyani, A., Firmansyah, M. & Abania, N. (2022). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(6), 1307–1314. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022956098>
- Manoppo, E. V. & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi *Jurnal Konstituen*, 4(1), 25–39. <https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598>
- Nurhasanah, S., Juanda, B. & Sugema, I. (2024). Dampak Program Bantuan Sosial Tunai terhadap Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 30–43. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.30-43>
- Papastergios, V. & Gounaris, A. (2024). A Survey of Open-Source Data Quality Tools: Shedding Light on the Materialization of Data Quality Dimensions in Practice. *arXiv Preprint*, arXiv:2407.18649. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.18649>
- Santoso, A., Kurniawati, E. & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79–94. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v17i1.176>
- SKALA. (2025). *Data untuk Pembangunan: Kolaborasi Menuju Indonesia yang Inklusif*. Dilihat 17 Juli 2026. <https://skala.or.id/publikasi/data-untuk-pembangunan-kolaborasi-menuju-indonesia-yang-inklusif/>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Socio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 14–31. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>



Uswanas, K. P. & Nuraida, R. (2023). Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 228–246. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3606>